

ANALISIS LKPD DAN PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DAN KABUPATEN CILACAP

Serli Agustia Putri^{*1}, Husniatul Husna², Noviantika Putri³, Salamah Ramadhani⁴,
Maisarah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Syiah Kuala

serliagustia28@gmail.com¹, husniatulhusna@gmail.com², noviantikaberuh@gmail.com³,
salamah.ramadhani@gmail.com⁴, siti.mei.sarah06@gmail.com⁵

Received: 11-06-2024

Revised: 14-06-2024

Approved: 18-06-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dan perbandingan antar komponen LKPD pada Pemda yang sama dan melihat tingkat keterbandingan (comparability) dari kedua LKPD dengan tahun anggaran yang sama pada dua Pemda yang berbeda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dimana data tersebut sudah tersedia dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan positif dengan kenaikan Aset Tetap pada Neraca. Belanja Modal dalam LRA menurun dari 2019 ke 2020, tetapi tidak signifikan terhadap kenaikan Aset Tetap. Beban Modal dalam LO juga tidak signifikan terhadap kenaikan Aset Tetap di Neraca. Pendapatan LO lebih besar daripada Pendapatan LRA karena basis akrual mengakui pendapatan lebih awal. Beban LO lebih besar daripada Belanja LRA karena basis akrual mengakui beban lebih awal. Terdapat selisih yang signifikan antara surplus/defisit LRA dan LO. Urutan penyajian LHP BPK dan SAP memiliki perbedaan pada laporan operasional dan arus kas. Komponen dalam LKPD seperti akun Neraca, PAD, dan LO memiliki perbedaan antara kedua kabupaten. Format dan substansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) juga berbeda antara kedua kabupaten.

Kata Kunci: LKPD, Keterbandingan, PEMDA

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah di Indonesia bersifat otonom. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ristanti & Handoyo, 2017). Otonomi daerah ini yang menyebabkan perbedaan dengan urutan penyajian LKPD dan unsur-unsur dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Neraca yang dapat berbeda nama akun dan rinciannya. Di dalam akuntansi pemerintahan, terdapat teori komparasi yang menjelaskan perbedaan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terjadi oleh perbedaan dalam tujuan dan regulasi. Menurut (Ololade, 2024), analisis komparatif ini penting karena beberapa alasan:

- 1) Laporan ini memberikan wawasan tentang bagaimana lingkungan peraturan, ekonomi, dan budaya yang berbeda mempengaruhi penerapan dan dampak

solusi fintech.

- 2) Laporan ini menyoroti tantangan dan peluang unik dalam mendorong inklusi keuangan di berbagai lingkungan.
- 3) Memahami dinamika ini dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti tentang praktik dan strategi terbaik yang dapat diadaptasi atau diperluas ke seluruh negara untuk meningkatkan inklusi keuangan global.

Menurut (Rahmah, 2017), kinerja pemerintah menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Di sisi lain, kecilnya penyerapan anggaran dalam tahun berjalan dan fenomena penyerapan anggaran besar-besaran di setiap akhir tahun dapat mempengaruhi output dan outcome yang diharapkan dari program yang dianggarkan pada tahun berjalan; mengganggu pertumbuhan ekonomi; serta membuka celah penyalahgunaan anggaran. Oleh sebab itu, semakin besar tingkat penyerapan anggaran, maka diharapkan semakin cepat tujuan program terlaksana. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran akan menghasilkan dana menganggur (*idle money*) yang tidak produktif yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil dari penelitian (Rafael, 2022), menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan pada masa pandemi COVID-19, dimana kebijakan realokasi dan refocusing anggaran pemerintah daerah menyebabkan belanja pemerintah daerah berfokus pada penanganan dampak pandemi COVID-19 sehingga berdampak pada pengurangan belanja modal yang menyebabkan rasio belanja modal menurun.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang berkinerja baik ingin menyampaikan informasi lebih lengkap kepada publik (pengguna laporan keuangan), namun perusahaan yang mengalami masalah keuangan memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan sesedikit mungkin (Kharisma, 2014). Apakah hal ini berlaku untuk Pemda pada saat menyajikan LKPD? Mengenai Teori Sinyal, tentunya sangat berlaku bagi Pemda saat menyajikan LKPD. Mengapa? karena hal ini memberikan transparansi dan kepercayaan publik. Dimana sesuai dengan teorinya, Pemda yang berkinerja baik ingin menunjukkan atau menyampaikan informasi yang lebih lengkap kepada publik (pengguna laporan keuangan). Dengan memberikan transparansi dan kepercayaan publik, Pemda akan terhindari dari adanya kritik. Salah satu masalah dalam pelaporan keuangan berbasis akrual adalah terjadinya manajemen laba (*earnings management*) atau *accrual management* melalui perekrasan terhadap Pendapatan dan Beban. Pada Pemda, hal ini berimplikasi pada besaran Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit-LO. Apakah Pemda "miskin" melakukan manajemen akrual lebih besar dari pemda "kaya"? Apakah Kapasitas Fiskal daerah dapat memprediksi kecenderungan pengaturan akrual ini. Dalam hal ini, Pemda "Miskin" mungkin lebih sering melakukan manajemen akrual daripada Pemda "Kaya". Mengapa? Karena mereka ingin menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik untuk menarik dana. (Rafael, 2022) Kapasitas Fiskal dapat memprediksi kecenderungan ini karena daerah dengan sumber daya yang lebih banyak (Pemda "Kaya") biasanya memiliki pengawasan yang lebih baik dan lebih transparan

sehingga mengurangi manipulasi laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, serta perubahan ekuitas pada suatu periode tertentu (Ningtyas & Widyawati, 2019). LKPD bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah kepada stakeholders, termasuk masyarakat umum, lembaga pengawas, dan pemerintah pusat.

Analisis LKPD

Analisis LKPD merupakan proses evaluasi dan interpretasi terhadap informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Putra & Varina, 2021). Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami kondisi keuangan pemerintah daerah, mengidentifikasi tren dan pola-pola yang relevan, serta mengevaluasi kinerja keuangan secara menyeluruh. Analisis ini meliputi berbagai metode dan teknik seperti analisis rasio keuangan, perbandingan antarperiode, serta analisis terhadap komponen-komponen laporan keuangan.

Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Cilacap

Perbandingan laporan keuangan antara dua pemerintah daerah (Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Cilacap) dilakukan untuk membandingkan posisi keuangan, kinerja keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, serta praktik pengelolaan keuangan lainnya (Juliyanti, 2023). Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan keuangan kedua entitas tersebut, serta untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan, meringkas, dan mengungkapkan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang ada di masyarakat, yang menjadi objek penelitian.

Karakteristik Metode Kualitatif-Deskriptif

Deskripsi dan Gambaran :

Metode ini bertujuan untuk menarik realitas kondisi, situasi, atau fenomena yang diteliti ke permukaan. Ini dilakukan dengan cara memberikan ciri, karakteristik, sifat, model, tanda, atau gambaran yang jelas.

1. Pendekatan Kualitatif: Fokus utama penelitian ini adalah pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang ada. Data yang dikumpulkan cenderung bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik.
2. Penggunaan Data Sekunder: Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Agam. Data ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dapat dianggap memiliki tingkat keakuratan yang tinggi.

Analisis Data:

1. Metode Analisis: Data yang dikumpulkan dari LRA tersebut dianalisis menggunakan metode rasio. Metode rasio yang digunakan meliputi:

- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: Untuk mengevaluasi sejauh mana daerah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara mandiri.
- Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD): Untuk mengukur seberapa efektif pendapatan asli daerah dalam mendukung keuangan daerah.
- Rasio Kekeragaman: Untuk mengevaluasi kesesuaian antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga menunjukkan keseimbangan anggaran yang tercipta.

2. Tujuan Analisis: Analisis rasio ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap kondisi keuangan daerah yang menjadi fokus penelitian.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kondisi keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Agam, serta menggambarkan berbagai aspek penting

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis LKPD Satu Tahun Anggaran

a) Analisis LKPD Kabupaten Padang Pariaman

1.1 Hubungan Realisasi Belanja Modal dalam LRA dan LO pada Penambahan Aset Tetap Di Neraca

Tabel 1 Hubungan Realisasi Belanja Modal dalam LRA dan LO pada Penambahan Aset Tetap Di Neraca

| NERACA | 2019 | 2020 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Asset Tetap | Rp1.180.071.422.244,22 | Rp1.188.372.725.383,19 |
| Kenaikan Aset Tetap | Rp8.301.303.138,97 | |
| Laporan Realisasi Anggaran | | |
| Belanja Modal | Rp263.182.047.537,00 | Rp182.335.821.634,00 |
| Penurunan Belanja Modal | Rp80.846.225.903,00 | |
| Laporan Operasional | | |
| Beban Modal | Rp1.369.479.947.117,62 | Rp1.302.428.230.079,25 |
| Penurunan Beban Modal | Rp67.051.717.038,37 | |

1.2 Analisis Realisasi Belanja Modal dalam LRA terhadap kenaikan Aset Tetap dalam Neraca.

Berdasarkan data yang tersedia dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, dapat dilihat bahwa aset tetap yang tersedia dalam Neraca dan Belanja Modal dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran) memiliki hubungan positif untuk tahun yang sama karena keduanya menunjukkan angka yang positif. Belanja modal dalam LRA menunjukkan Rp263.182.047.537,00 untuk realisasi 2019. Sedangkan realisasi 2020 menunjukkan Belanja Modal sebesar Rp182.335.821.634,00. Terjadinya penurunan antara realisasi 2020 dan 2019 sebesar Rp80.846.225.903,00. Dalam hal ini, belanja modal dalam LRA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan aset tetap di neraca pada tahun yang sama.

1.3 Analisis Beban Modal dalam LO terhadap kenaikan Aset Tetap dalam Neraca.

Berdasarkan data yang tersedia dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, dapat dilihat bahwa beban belanja dalam Laporan Operasional kepada aset tetap dalam Neraca memiliki hubungan tidak signifikan, karena tidak semua akun atau komponen yang terdapat pada Laporan Operasional tersebut mempengaruhi secara langsung terhadap aset tetap yang ada dalam Neraca. Akan tetapi terdapat beberapa komponen yang memiliki hubungan dengan aset tetap dalam Neraca yaitu seperti akun penyusutan dan pemeliharaan yang ada dalam Laporan Operasional. Hal ini dapat kita lihat apabila memiliki aset yang lebih banyak maka mengakibatkan penyusutan yang tercatat lebih besar juga, begitu pula dengan beban pemeliharaan semakin banyak aset tetapi yang ada maka beban pemeliharaan akan semakin besar.

Beban Modal dalam LO menunjukkan Rp263.182.047.537,00 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan beban modal sebesar Rp182.335.821.634,00. Terjadinya penurunan antara 2019 dan 2020 sebesar Rp67.051.717.038,37. Dalam hal ini, beban modal dalam LO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan aset tetap di neraca pada tahun yang sama.

2. Perbandingan LRA Basis Kas dengan LO Basis Akrual

1.1 Perbandingan Pendapatan LRA dan LO

Tabel 2. Perbandingan Pendapatan LRA dan LO

| Laporan Realisasi Anggaran | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Jumlah Pendapatan Laporan Operasional | Rp1.510.528.680.350,01 | Rp1.305.720.724.442,99 |
| Jumlah Pendapatan Selisih | Rp1.522.440.918.575,41 | Rp1.282.352.428.986,69 |
| | Rp11.912.238.225 | Rp23.368.313.456 |

Pada tahun 2019 Pendapatan dalam LRA menunjukkan angka sebesar Rp1.510.528.680.350,01 dan pendapatan dalam LO tahun 2019 menunjukkan angka sebesar Rp1.522.440.918.575,41 dengan selisih Rp11.912,238.225. Dalam hal ini dapat dilihat pendapatan dalam LO dengan basis akrual lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan yang ada dalam LRA. Hal ini dikarenakan pada saat pencatatan pendapatan dengan basis akrual walaupun pendapatan belum di terima, akan tetapi sudah diakui atau dicatat dalam Laporan Operasional. Yang berbeda dengan basis kas dalam LRA, dimana pendapatan tidak diakui sebelum kas tersebut diterima, sehingga mengakibatkan pendapatan yang mungkin terjadi pada tahun 2019 menjadi pendapatan yang diakui pada tahun berikutnya.

Pada realisasi tahun 2020 menunjukkan angka pendapatan dalam LRA sebesar Rp1.305.720.742.442,99. Sedangkan pendapatan dalam LO tahun 2020 menunjukkan angka sebesar Rp1.282.352.428.986,69. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pendapatan dalam LRA yang menggunakan basis kas lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan dalam LO yang menggunakan basis akrual dengan selisih sebesar Rp23.368.313.456. Mengapa demikian? Tahun 2020 kemungkinan adanya pendapatan yang baru diakui yang transaksinya telah terjadi pada akhir tahun 2019. Sebagaimana basis kas mengakui pendapatan saat uang telah diterima. Berbeda dengan basis akrual yang pendapatan segera diakui walaupun uang belum diterima. Alasan lain dalam hal ini yaitu saat terjadinya transaksi pendapatan tangguhan atau pendapatan diterima di

muka. Ini sama halnya dengan alasan diatas, dimana pendapatan diterima dimuka diakui pada saat kas diterima.

1.2 Perbandingan belanja LRA dan Beban LO

Tabel 3. Perbandingan belanja LRA dan Beban LO

| Laporan Realisasi Anggaran | 2019 | 2020 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Belanja | Rp 1.262.747.805.742 | Rp 1.169.422.356.101,00 |
| Laporan Operasional | | |
| Jumlah Beban | Rp 1.369.479.947.117,62 | Rp 1.302.428.230.079,25 |
| Selisih | Rp 106.732.141.376 | Rp 133.005.873.978,25 |

Pada realisasi Tahun 2019, Belanja dalam LRA menunjukkan angka sebesar Rp1.262.747.805.742, sedangkan beban dalam LO tahun 2019 menunjukkan angka sebesar Rp1.369.479.947.117,62. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Beban dalam LO yang menggunakan basis akrual lebih besar dibandingkan belanja dalam LRA dengan selisih Rp106.732.141.376. Pada realisasi Tahun 2020, Belanja dalam LRA menunjukkan angka sebesar Rp1.169.422.356.101,00. sedangkan beban dalam LO tahun 2020 menunjukkan angka sebesar Rp1.302.428.230.079,25. dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Beban dalam LO yang menggunakan basis akrual lebih besar dibandingkan belanja dalam LRA dengan selisih Rp133.005.873.978,25. Dapat disimpulkan, Pada tahun 2019 dan 2020 pencatatan beban dalam LO dengan basis akrual menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan pencatatan belanja dalam LRA dengan basis kas. Mengapa demikian? karena pencatatan dengan basis akrual akan segera diakui meskipun kas belum dibayarkan. Sehingga beban pada LO akan terlihat lebih besar. Berbeda dengan basis kas pada LRA, dimana beban tidak dapat diakui sebelum kas dibayarkan.

1.3 Perbandingan Surplus/Defisit LRA dan LO

Tabel 4 Perbandingan Surplus/Defisit LRA dan LO

| Laporan Realisasi Anggaran | 2019 | 2020 |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Surplus/Defisit | Rp65.971.786.315,31 | (Rp37.956.336.410,01) |
| Laporan Operasional | | |
| Surplus/Defisit | Rp152.960.971.457,79 | (Rp20.075.801.892,56) |

Pada tahun 2019, LRA mengalami SURPLUS sebesar Rp65.971.786.315,31, dan LO juga mengalami SURPLUS sebesar Rp152.960.971.457,79. Maka selisih antara keduanya sebesar Rp86.989.185.142, dimana LO mengalami SURPLUS yang lebih besar dibandingkan dengan LRA. Pada tahun 2020, LRA mengalami DEFISIT sebesar (Rp37.956.336.410,01). dan LO juga mengalami DEFISIT sebesar (Rp20.075.801.892,56). Maka selisih antara keduanya sebesar (Rp17.880.534.517), dimana LRA mengalami DEFISIT yang lebih besar dibandingkan dengan LO. Mengapa demikian? Karena, terdapat perbedaan antara keduanya saat mengakui beban dan pendapatan. LO yang menganut system basis akrual akan terlebih dahulu mengakui dan

mencatat pendapatannya dan mengakui beban pada saat terjadinya transaksi yang berbanding terbalik dengan basis kas.

b) Analisis LKPD Kabupaten Cilacap

1. Hubungan Realisasi Belanja Modal dalam LRA dan LO pada Penambahan Aset Tetap Di Neraca

Tabel 5 Hubungan Realisasi Belanja Modal dalam LRA dan LO pada Penambahan Aset Tetap Di Neraca

| Neraca | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Aset Tetap | Rp3.918.857.106.762 | Rp4.194.060.979.387 |
| Kenaikan Aset Tetap | Rp275.203.872.625 | |
| Laporan Realisasi Anggaran | | |
| Belanja Modal | Rp1.326.642.396.012 | Rp924.863.867.568 |
| Penurunan Belanja Modal | Rp401.778.528.444 | |
| Laporan Operasional | | |
| Beban Modal | Rp5.045.661.373.815 | Rp4.746.903.914.856 |
| Penurunan Beban Modal | Rp298.757.458.959 | |

1.1 Analisis Realisasi Belanja Modal dalam LRA terhadap kenaikan Aset Tetap dalam Neraca.

Berdasarkan data yang tersedia dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020, dapat dilihat bahwa aset tetap yang tersedia dalam Neraca dan Belanja Modal dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran) memiliki hubungan positif untuk tahun yang sama karena keduanya menunjukkan angka yang positif. Belanja modal dalam LRA menunjukkan Rp1.326.642.396.012 untuk realisasi 2019. Sedangkan realisasi 2020 menunjukkan Belanja Modal sebesar Rp924.863.867.568. Terjadinya penurunan antara realisasi 2020 dan 2019 sebesar Rp401.778.528.444. Dalam hal ini, belanja modal dalam LRA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan aset tetap di neraca pada tahun yang sama.

1.2 Analisis Beban Modal dalam LO terhadap kenaikan Asset Tetap dalam Neraca.

Berdasarkan data yang tersedia dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020, dapat dilihat bahwa beban belanja dalam Laporan Operasional kepada aset tetap dalam Neraca memiliki hubungan tidak signifikan, karena tidak semua akun atau komponen yang terdapat pada Laporan Operasional tersebut mempengaruhi secara langsung terhadap aset tetap yang ada dalam Neraca. Akan tetapi terdapat beberapa komponen yang memiliki hubungan dengan aset tetap dalam Neraca yaitu seperti akun penyusutan dan pemeliharaan yang ada dalam Laporan Operasional. Hal ini dapat kita lihat apabila memiliki aset yang lebih banyak maka mengakibatkan penyusutan yang tercatat lebih besar juga, begitu pula dengan beban pemeliharaan semakin banyak aset tetapi yang ada maka beban pemeliharaan akan semakin besar. Beban Modal dalam LO menunjukkan Rp5.045.661.373.815. Sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan beban modal sebesar Rp4.746.903.914.856. Terjadinya penurunan antara 2019 dan 2020 sebesar Rp298.757.458.959. Dalam hal ini, beban modal dalam LO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan aset tetap di neraca pada tahun yang sama.

1. Perbandingan LRA basis kas dan LO basis akrual
 - 1.1 perbandingan pendapatan LRA dan LO

Tabel 6. Perbandingan pendapatan LRA dan LO

| Laporan Realisasi Anggaran | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Jumlah Pendapatan | Rp3.282.797.966.310,59 | Rp3.152.402.455.712,48 |
| Laporan Operasional | | |
| Jumlah Pendapatan | Rp3.579.381.406.177,10 | Rp2.983.073.055.999,13 |
| Selisih | Rp296.583.439.866,51 | Rp169.329.399.713 |

Pada tahun 2019 Pendapatan dalam LRA menunjukkan angka sebesar Rp3.282.797.966.310,59 dan pendapatan dalam LO tahun 2019 menunjukkan angka sebesar Rp3.579.381.406.177,10 dengan selisih Rp296.583.439.866,51. Dalam hal ini dapat dilihat pendapatan dalam LO dengan basis akrual lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan yang ada dalam LRA. Hal ini dikarenakan pada saat pencatatan pendapatan dengan basis akrual walaupun pendapatan belum di terima, akan tetapi sudah diakui atau dicatat dalam Laporan Operasional. Yang berbeda dengan basis kas dalam LRA, dimana pendapatan tidak diakui sebelum kas tersebut diterima, sehingga mengakibatkan pendapatan yang mungkin terjadi pada tahun 2019 menjadi pendapatan yang diakui pada tahun berikutnya. Pada realisasi tahun 2020 menunjukkan angka pendapatan dalam LRA sebesar Rp3.152.402.455.712,48. Sedangkan pendapatan dalam LO tahun 2020 menunjukkan angka sebesar Rp2.983.073.055.999,13. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pendapatan dalam LRA yang menggunakan basis kas lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan dalam LO yang menggunakan basis akrual dengan selisih sebesar Rp169.329.399.713. Mengapa demikian? Tahun 2020 kemungkinan adanya pendapatan yang baru diakui yang transaksinya telah terjadi pada akhir tahun 2019. Sebagaimana basis kas mengakui pendapatan saat uang telah diterima. Berbeda dengan basis akrual yang pendapatan segera diakui walaupun uang belum diterima. Alasan lain dalam hal ini yaitu saat terjadinya transaksi pendapatan tanggungan atau pendapatan diterima di muka. Ini sama halnya dengan alasan diatas, dimana pendapatan diterima dimuka diakui pada saat kas diterima.

- 1.2 Perbandingan Belanja LRA dan Beban LO

Tabel 7. Perbandingan Belanja LRA dan Beban LO

| Laporan Realisasi Anggaran | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Jumlah Belanja | Rp2.779.740.306.711 | Rp2.607.739.427.660 |
| Laporan Operasional | 2019 | 2020 |
| Jumlah Beban | Rp2.593.092.809.606 | Rp2.631.274.004.746 |
| Selisih | Rp186.647.497.105 | Rp23.534.577.086 |

Pada realisasi tahun 2019, jumlah belanja dalam LRA menunjukkan angka sebesar Rp2.779.740.306.711, sedangkan beban dalam LO tahun 2019 menunjukkan angka

sebesar Rp2.593.092.809.606. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Beban dalam LO yang menggunakan basis akrual lebih besar dibandingkan belanja dalam LRA dengan selisih Rp186.647.497.105,42. Pada realisasi Tahun 2020, jumlah belanja dalam LRA menunjukkan angka sebesar Rp2.607.739.427.660, sedangkan beban LO Tahun 2019 menunjukkan angka sebesar Rp2.631.274.004.746. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Beban dalam LO yang menggunakan basis akrual lebih besar dibandingkan belanja dalam LRA dengan selisih Rp 23.534.577.086. Dapat disimpulkan, Pada tahun 2019 dan 2020 pencatatan beban dalam LO dengan basis akrual menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan pencatatan belanja dalam LRA dengan basis kas. Mengapa demikian? karena pencatatan dengan basis akrual akan segera diakui meskipun kas belum dibayarkan. Sehingga beban pada LO akan terlihat lebih besar. Berbeda dengan basis kas pada LRA, dimana beban tidak dapat diakui sebelum kas dibayarkan.

1.3 Perbandingan Surplus/Defisit LRA dan LO

Tabel 8. Perbandingan Surplus/Defisit LRA dan LO

| Laporan Realisasi Anggaran | 2019 | 2020 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Surplus/Defisit | (Rp523.171.575,61) | Rp63.567.635.452,48 |
| Laporan Operasional | | |
| Surplus/Defisit | Rp984.869.109.928,99 | Rp351.947.285.779,80 |

Pada tahun 2019, LO mengalami SURPLUS sebesar Rp984.869.109.928,99, dan LRA mengalami DEFISIT sebesar (Rp523.171.575,61). Berdasarkan data tersebut terdapat selisih antara SURPLUS dalam LO dan DEFISIT dalam LRA sebesar Rp984.345.938.353,38.

Pada tahun 2020 terjadi perubahan yang signifikan yakni kedua laporan baik LO maupun LRA keduanya mengalami SURPLUS. SURPLUS dalam LRA sebesar Rp63.567.635.452,48, dan SURPLUS dalam LO sebesar Rp351.947.285.779,80. Selisih antara keduanya sebesar Rp288.379.650.327,32. Dapat disimpulkan bahwa, jumlah beban yang ada dalam LO (Laporan Operasional) lebih besar dengan menggunakan basis akrual dibandingkan Belanja yang ada dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dengan selisih Rp186.647.497.105,4.

c). Perbandingan LKPD Kabupaten Padang Pariaman Dan Kabupaten Cilacap

1. Perbandingan urutan penyajian

Menurut LHP BPK (daerah terkait) dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Kedua LHP BPK kabupaten Padang pariaman dan Cilacap menggunakan urutan penyajian yang sama diantaranya:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Arus kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Laporan Operasional
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

Terdapat perbedaan urutan penyajian pada Laporan Arus Kas dan Laporan Operasional. Pada LHP BPK, Laporan Operasional disajikan terlebih dahulu dan kemudian disajikannya Laporan Arus Kas. Perbedaan urutan laporan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat disebabkan oleh beberapa alasan yang berkaitan dengan prioritas informasi dan kebutuhan analisis yang berbeda dari kedua entitas tersebut. Hal ini dapat berupa:

1. Fokus utama BPK: BPK lebih mengutamakan Laporan Operasional terlebih dahulu dengan tujuan untuk menilai bagaimana pemerintah menjalankan kegiatannya, kemudian bagaimana mereka menggunakan anggaran, dan keefektivitas penggunaannya. Hal tersebut penting bagi auditor dan legislator untuk mengevaluasi kinerja dan akuntabilitas.
2. Fokus Utama SAP: SAP lebih mengutamakan Laporan Arus Kas karena penting bagi manajemen keuangan pemerintah untuk paham akan adanya aliran uang masuk dan keluar. Hal tersebut penting dalam pengelolaan likuiditas dan memastikan pemerintah dapat memenuhi kewajiban keuangannya.

2. Komponen dalam LKPD

a. Perbandingan akun dalam Neraca

1. Dalam Neraca LHP BPK Padang Pariaman pada bagian asset lancar menyajikan dengan lengkap setiap asal piutang seperti Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang BLUD dan Piutang Transfer Pusat. sedangkan pada LHP BPK Kabupaten Cilacap, semua akun piutang dirangkum dalam satu akun piutang pendapatan dan piutang lainnya.
2. Dalam Neraca LHP BPK Padang Pariaman dan LHP BPK Kabupaten Cilacap terdapat 8 akun yaitu: Kas Di Kas Daerah – Kas Di Bendahara Penerimaan – Kas Di Bendahara Pengeluaran – Kas BLUD – Kas Di Bendahara FKTP – Kas Di Bendahara BOS – Kas Lainnya – Setara Kas.
3. Kenaikan Atau Penurunan Akun Neraca

Tabel 9. LHP BPK Padang Pariaman

| Akun | Kenaikan | Penurunan |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Asset lancar | | Rp31.642.502.307,11 |
| Investasi jangka panjang | Rp1.128.958.438,54 | |
| Asset Tetap | Rp8.301.303.138,97 | |
| Kewajiban/Hutang | | Rp23.745.463.822,4 |

Tabel 10. LHP BPK Kabupaten Cilacap

| Akun | Kenaikan | Penurunan |
|--------------|------------------|-----------|
| Asset lancar | Rp67.908.011.056 | |

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Investasi jangka panjang | | Rp30.380.474.080 |
| Aset Tetap | Rp275.203.872.625 | |
| Kewajiban/Hutang | | Rp14.320.840.632 |

Secara keseluruhan format yang tercantum dalam LHP BPK Padang Pariaman dan LHP BPK Kabupaten Cilacap memiliki format yang sama. Semu judul besar akun terlihat sama. Akan tetapi, di dalam uraian akun terdapat beberapa akun yang berbeda di setiap LHP BPK yaitu seperti akun Piutang. Pada LHP BPK Padang Pariaman lebih spesifik diuraikan.

b. Perbandingan Akun Dalam LRA

Setiap komponen PAD dalam LRA pada kedua LKPD memiliki komponen yang sama tidak ada perbedaan antara Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Cilacap.

Tabel 11. PAD kabupaten Padang Pariaman

| Akun | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | Surplus/ Defisit |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Pendapatan pajak daerah | 40.900.000.000 | 41.824.536.856,45 | Surplus |
| Pendapatan retribusi daerah | 2.725.900.000 | 2.185.534.022 | Defisit |
| Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 6.150.000.000 | 6.860.844.053 | Surplus |
| Lain-lain PAD yang sah | 62.413.812.837 | 55.023/011.108,54 | Defisit |
| Jumlah pendapatan asli daerah | 112.189.712.837 | 105.893.926.039,99 | Defisit |

Tabel 12. PAD Kabupaten Cilacap

| Akun | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | Surplus/ Defisit |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Pendapatan pajak daerah | 199.810.000.000,00 | 203.188.563.271,00 | Surplus |
| Pendapatan retribusi daerah | 18.139.721.798,00 | 18.969.873.119,00 | Surplus |
| Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 45.597.285.958,00 | 44.675.178.661,00 | Defisit |
| Lain-lain PAD yang sah | 297.566.701.309,00 | 324.510.172.109,48 | Surplus |

c. Perbandingan Akun Dalam LO

1. Perbandingan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA pada Kabupaten Padang Pariaman.

Pada akun pendapatan PAD Kabupaten Padang Pariaman tidak terdapat perbedaan akun pada pendapatan LRA dan pendapatan LO. Hanya saja total hasil pendapatan yang berbeda. Karena perhitungan memakai dua metode yang berbeda yaitu LO dengan basis akrual dan LRA dengan basis kas. Hal ini terjadi karena beberapa jenis pendapatan memiliki karakteristik yang sama, sehingga diakui pada periode yang sama dalam kedua laporan. Contohnya, Pendapatan dari penjualan barang dan jasa: Akun ini mencatat pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan bunga: Akun ini mencatat pendapatan yang diperoleh dari bunga deposito, pinjaman, atau investasi lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Perbandingan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA Kabupaten Cilacap.

Pada akun pendapatan Kabupaten Cilacap, terdapat beberapa perbedaan akun yang tercantum pada laporan, hal ini dikarenakan kedua laporan ini menggunakan basis akuntansi yang berbeda. LO menggunakan basis akrual sedangkan LRA menggunakan

basis kas, sehingga perbedaan ini mengakibatkan beberapa jenis pendapatan yang di akui pada periode yang berbeda dalam LO dan LRA. Contohnya, pada akun dana bagi hasil yang hanya ada pada basis kas di LRA sedangkan Basis akrual di LO tidak ada.

3. Perbandingan Pendapatan LO Kabupaten Padang Pariaman Dengan LO Kabupaten Cilacap.

Terdapat beberapa perbedaan akun pada pendapatan LO di kedua kabupaten ini, beberapa akun pendapatan yang ada pada Kabupaten Padang Pariaman tidak ada pada Kabupaten Cilacap. Contohnya akun DAU, DAK, dan Dana Otonomi Khusus.

4. Perbandingan Beban LO Dan Belanja LRA pada Kabupaten Padang Pariaman Dan Kabupaten Cilacap

Pada laporan belanja LRA, menyajikan tiga jenis belanja yaitu, belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Sedangkan pada laporan beban LO hanya menyajikan Beban Operasional yang ada dalam LRA saja. Hal ini dikarenakan belanja modal tidak berhubungan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode berjalan, sehingga belanja modal tidak dicatat. Akan tetapi, mencatat akun pemeliharaan dan penyusutan terhadap asset tetap pada LO, dan Belanja Tak Terduga yang merupakan pengeluaran yang tidak biasa dan tidak terduga sehingga tidak dapat diprediksi dan dianggarkan secara akurat. Oleh karena itu, hanya belanja operasional yang dicatat dalam LO karena berkaitan langsung dengan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode berjalan.

5. Perbandingan beban LO kabupaten padang pariaman dengan beban LO kabupaten Cilacap

Terdapat beberapa perbedaan akun pada beban LO. Kabupaten Cilacap terdapat akun beban bunga, beban subsidi, beban bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan desa, beban bantuan keuangan kepada prov/kab/kota/desa. Sedangkan pada beban LO Padang Pariaman tidak ada karena kemungkinan tidak ada transaksi pinjaman yang berbunga dan tidak ada bantuan keuangan yang diberikan kepada provinsi/kab/kota/desa lain.

d. Perbandingan Format Dan Substansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Tabel 13. Perbandingan Format Dan Substansi
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

| LKPD Kabupaten Padang Pariaman | LKPD Kabupaten cilacap |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidak mencantumkan judul besar di atasnya yaitu “catatan atas laporan keuangan” | Membuat judul besar sebelumnya yaitu “catatan atas laporan keuangan” |
| Setiap komponen ditandai dengan menggunakan urutan huruf | Setiap komponen ditandai dengan urutan angka Romawi |
| Menggunakan footer | Tidak menggunakan footer |
| Terdapat poni pencapaian target kinerja APBD | Tidak mencantumkan target kinerja APBD |
| Tidak ada penjelasan SILPA | Mencantumkan penjelasan SILPA |
| Pada ikhtisar pencapaian kinerja keuangan di jelaskan hanya menggunakan tabel dan penjelasannya tidak rinci sumber pendapatan tersebut dari mana saja | Pada ikhtisar pencapaian kinerja keuangan di jelaskan menggunakan tabel dan diagram serta di jelaskan sumber pendapatan tersebut |

| LKPD Kabupaten Padang Pariaman | LKPD Kabupaten cilacap |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | darimana saja secara rinci. |
| Pada saat pandemi Tahun 2020 tidak mencantumkan laporan atas anggaran pencegahan dan penanganan covid-19 | Pada pandemi tahun 2020 menjelaskan secara detail laporan atas anggaran pencegahan dan penanganan covid-19 |
| Pada penjelasan post-post laporan keuangan dijelaskan lebih rinci dengan menggunakan tabel dan diagram | Penjelasan post-post laporan keuangan hanya menggunakan tabel dan penjelasan |
| pada bab 6 menjelaskan pengungkapan informasi penting lainnya seperti penggantian manajemen, komitmen dan kontigensi, struktur organisasi dan kepemimpinan daerah | Pada bab 6 menjelaskan tentang penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yaitu membahas tentang dasar hukum pembentukan Kabupaten Cilacap, letak geografis, demografi dan lain sebagainya |

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dilihat, Hubungan Realisasi Belanja Modal dalam LRA dan LO pada Penambahan Aset Tetap Di Neraca, Analisis Realisasi Belanja Modal dalam LRA menunjukkan hubungan positif dengan kenaikan Aset Tetap pada Neraca. Belanja Modal dalam LRA menurun dari 2019 ke 2020, tetapi tidak signifikan terhadap kenaikan Aset Tetap. Beban Modal dalam LO juga tidak signifikan terhadap kenaikan Aset Tetap di Neraca. Lalu Perbandingan LRA Basis Kas dengan LO Basis Akrua, Pendapatan LO lebih besar daripada Pendapatan LRA karena basis akrual mengakui pendapatan lebih awal. Beban LO lebih besar daripada Belanja LRA karena basis akrual mengakui beban lebih awal. Terdapat selisih yang signifikan antara surplus/defisit LRA dan LO. Perbandingan LKPD Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Cilacap, Urutan penyajian LHP BPK dan SAP memiliki perbedaan pada laporan operasional dan arus kas. Komponen dalam LKPD seperti akun Neraca, PAD, dan LO memiliki perbedaan antara kedua kabupaten. Format dan substansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) juga berbeda antara kedua kabupaten. Teori Sinyal berlaku untuk Pemda dalam menyajikan LKPD, dengan Pemda yang berkinerja baik cenderung lebih transparan. Pemda "miskin" lebih cenderung melakukan manajemen akrual dalam laporan keuangan. Kapasitas fiskal daerah dapat memprediksi kecenderungan manajemen akrual, dengan Pemda miskin lebih mungkin melakukan manipulasi laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ololade, J. Y. (2024). Konseptualisasi Inovasi, Fintech dan Inklusi Keuangan : Analisis Perbandingan Inisiatif Afrika dan Amerika Serikat. *Jurnal penelitian Keuangan dan Akuntansi*, 546-555.
- Rafael, S. J. (2022). Comparative Analysis of Local Government's Financial Performance Before and During the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8, 199-212.
- Rahmah, Z. &. (2017). Analisis Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 213-222.
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan

- Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006>
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 1–34. <https://doi.org/10.24843/BSE.2014.v25.i01.p02>
- Ningtyas, P. E., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(1), 1–14.
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2), 115–122.